

## DAMPAK KEBIJAKAN FISKAL TERHADAP KINERJA SEKTOR PERTANIAN DI PROVINSI RIAU

### The Impact of Fiscal Policy on Performance of Agriculture in Riau Province

Dinda Julia, Alla Asmara dan Heriyanto

Fakultas Ekonomi dan Manajemen, Institut Pertanian Bogor. Jl. Kamper, Kampus IPB Dramaga, Bogor, 085278262490

[Diterima: Agustus 2015, Disetujui: November 2015]

#### ABSTRACT

Growth in the agricultural sector in Riau Province slowed from year to year so it needs the appropriate fiscal mechanisms. This research aims to analyze the factors affecting fiscal revenues and expenditures in the agricultural sector in the province of Riau, analyzing the impact of changes in fiscal revenues and expenditures on the performance of the agricultural sector in the province of Riau, and formulate appropriate fiscal policy conducted in the province of Riau. Econometric analysis carried out by the simultaneous equation estimation methods Two Stage Least Squares (2SLS). The results showed that (1) factors affecting fiscal revenues and expenditures is the GDP, revenue, expenditure economic sectors, the total reception area, population, population density, and the rest of the budget of the previous year with a positive impact, as well as the total regional spending and DAU with negative effects, (2) Changes in fiscal policy positive impact on the agricultural sector, especially food crops, (3) fiscal policy is appropriate to increase the performance of the agricultural sector Riau Province is the increase in spending agricultural sector 10% to the GDP agriculture increased 0.67% and agriculture increased labor absorption 0.16%.

**Keywords:** *Fiscal policy, Agricultural performance, Simultaneous equation*

#### ABSTRAK

Pertumbuhan sektor pertanian di Provinsi Riau mengalami perlambatan dari tahun ke tahun sehingga perlu adanya mekanisme fiskal yang tepat. Tujuan penelitian adalah menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan dan pengeluaran fiskal pada sektor pertanian di Provinsi Riau, menganalisis dampak perubahan penerimaan dan pengeluaran fiskal terhadap kinerja sektor pertanian di Provinsi Riau, serta merumuskan kebijakan fiskal yang tepat dilakukan di Provinsi Riau. Analisis ekonometrika dilakukan dengan persamaan simultan dengan metode pendugaan *Two Stage Least Squares* (2SLS). Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan dan pengeluaran fiskal adalah PDRB, PAD, pengeluaran sektor ekonomi, total penerimaan daerah, jumlah penduduk, kepadatan penduduk, dan sisa anggaran tahun sebelumnya dengan pengaruh yang positif, serta total pengeluaran daerah dan DAU dengan pengaruh negatif, (2) Perubahan kebijakan fiskal berdampak positif terhadap kinerja sektor pertanian khususnya subsektor tanaman pangan, (3) Kebijakan fiskal yang tepat dilakukan untuk meningkatkan kinerja sektor pertanian Provinsi Riau adalah peningkatan pengeluaran sektor pertanian 10% sehingga PDRB sektor pertanian meningkat 0.67% dan penyerapan tenaga kerja sektor pertanian meningkat 0.16%.

**Kata Kunci:** *Kebijakan fiskal, Kinerja sektor pertanian, Persamaan simultan*

#### PENDAHULUAN

Sektor pertanian merupakan sektor yang memiliki peran penting dalam perekonomian Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan peran sektor pertanian dalam meningkatkan produk domestik bruto maupun perolehan devisa negara, selain karena sebagian besar penduduk Indonesia bekerja di sektor pertanian. Pemba-

ngunan pertanian yang dilakukan oleh pemerintah bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan distribusi pendapatan, membuka peluang dan kesempatan kerja bagi masyarakat, serta memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.

Menurut Musgrave (1989), dalam perekonomian, pemerintah memiliki peranan yang

meliputi peran alokasi, peran distribusi, dan peran stabilisasi. Oleh sebab itu, menurut Dirgantoro (2010), pemerintah memiliki wewenang dalam pelaksanaan pembangunan. Pemerintah dapat mengatur hal-hal yang berhubungan dengan pengalokasian sumberdaya, distribusi faktor input dan hasil-hasil pembangunan serta mengatur stabilitas ekonomi. Pada tahap awal pembangunan dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi diperlukan intervensi pemerintah. Intervensi tersebut dilakukan dalam bentuk pengeluaran pemerintah untuk membangun infrastruktur dan fasilitas pelayanan umum.

Perkembangan beberapa tahun belakangan ini menunjukkan masyarakat mengharapkan agar potensi yang dimiliki daerah dapat dimanfaatkan secara maksimal. Oleh sebab itu, pemerintah mengeluarkan UU No. 22 Tahun 1999, tentang pemerintahan daerah dan UU No. 25 Tahun 1999, tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Kemudian direvisi menjadi UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Daerah diberikan wewenang dalam penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan prinsip-prinsip otonomi daerah dan dituntut kemandiriannya dalam melaksanakan pembangunan.

Pada tahun 2001, pola pembangunan dengan menerapkan kebijakan desentralisasi fiskal mulai diberlakukan. Dengan adanya kebijakan ini, Pemerintah Daerah mendapatkan keleluasaan untuk menyusun secara mandiri program-program dan melakukan realokasi dana anggaran sesuai dengan kondisi, kebutuhan, dan kapasitas daerah masing-masing. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan ekonomi daerah serta mengatasi permasalahan *equity* agar tercipta pemerataan dalam rangka mengurangi kesenjangan antar daerah. Bagi pemerintahan, desentralisasi fiskal yang berhasil akan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Menurut Saefudin (2005), respon pemerintah dalam menanggapi kewenangan desentralisasi fiskal yaitu: (1) fokus pada usaha memperbesar penerimaan (*revenue*) melalui intensifikasi dan perluasan pajak, retribusi daerah, serta memanfaatkan sumberdaya yang masih belum dimanfaatkan secara optimal dengan berbagai cara, salah satunya bagi hasil, dan (2) lebih berorientasi pada peningkatan

efektivitas pengeluaran (*expenditure*) dalam rangka menstimulasi dunia usaha melalui pengembangan iklim usaha yang lebih baik dan menguntungkan bagi daerahnya.

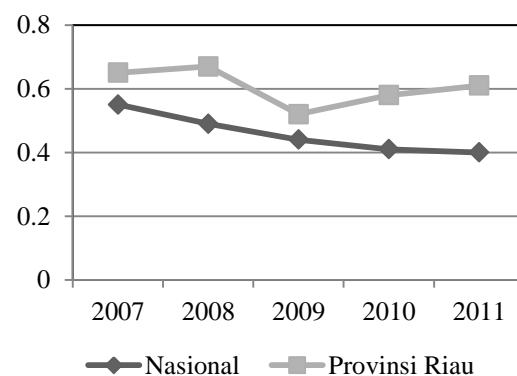
PDRB Provinsi Riau dari tahun 2009 sampai 2013 terus meningkat. Dimana sektor pertanian merupakan sektor andalan yang berkontribusi besar kedua bagi PDRB setelah pertambangan. Namun kinerja sektor pertanian diketahui mengalami perlambatan. Berdasarkan data Bank Indonesia (2013), diketahui pertumbuhan sektor pertanian pada tahun 2011 sebesar 4,3 persen kemudian menurun signifikan pada tahun 2012 menjadi sebesar 2,60 persen dan meningkat pada tahun 2013 menjadi sebesar 4,48 persen. Pertumbuhan sektor pertanian pada tahun 2012 merupakan pertumbuhan terendah selama lima tahun terakhir.

Adanya perlambatan pertumbuhan sektor pertanian seiring dengan perlambatan pertumbuhan pada seluruh subsektornya yang meliputi tanaman pangan, perkebunan, peternakan, kehutanan, dan perikanan.

Tabel 1. Pertumbuhan Sektor Pertanian Provinsi Riau, Tahun 2010-2013 (%)

Lapangan Usaha	2010	2011	2012	2013
Pertanian	3.87	4.32	2.60	4.48
1. Tanaman Pangan	3.16	4.80	1.21	0.49
2. Perkebunan	7.45	9.19	4.88	8.87
3. Peternakan	5.31	7.01	6.86	7.57
4. Kehutanan	-1.15	-3.85	-2.74	-1.51
5. Perikanan	6.08	7.59	7.05	4.12

Sumber: BPS Provinsi Riau (2014)



Gambar 1. Rasio Fiskal terhadap Total Pendapatan Daerah Provinsi Riau (Kementerian Keuangan, 2012)

Tanaman pangan mengalami perlambatan pertumbuhan sampai tahun 2013 dengan angka terendah yaitu sebesar 1,21 persen pada

tahun 2012 dan 0,49 persen pada tahun 2013 (Bank Indonesia, 2013).

Gambar 1 memperlihatkan rasio fiskal terhadap total pendapatan daerah dimana rasio ini mengukur tingkat kemampuan daerah dalam mendanai program prioritas daerah tersebut. Tren rasio ruang fiskal per total pendapatan daerah Riau memiliki kecenderungan menurun pada tahun 2007 sampai dengan tahun 2009. Kemudian mengalami peningkatan pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2011. Sedangkan rasio ruang fiskal terhadap total pendapatan daerah secara nasional memiliki tren yang menurun dari tahun 2007 hingga 2011. Namun demikian, rasio ruang fiskal per total pendapatan daerah Provinsi Riau lebih tinggi dibandingkan dengan rasio secara nasional (Kementerian Keuangan, 2012).

Hal ini memperlihatkan bahwa kemampuan Provinsi Riau telah cukup baik dalam hal kemandirian dan kemampuan daerahnya dalam membiayai berbagai program prioritas daerah seperti yang terdapat dalam misi pembangunan jangka menengah Provinsi Riau 2009-2013, diantaranya memperkuat keseimbangan antar wilayah sebagai kelanjutan dari pembangunan infrastruktur daerah, meningkatkan penanaman modal untuk mendukung lajunya pertumbuhan perekonomian, dan meningkatkan peran masyarakat dalam pembangunan.

Perubahan kondisi fiskal yang mengalami penurunan seiring dengan adanya perlambatan pertumbuhan sektor pertanian diduga dikarenakan kebijakan fiskal yang berlaku di Provinsi Riau menyebabkan terjadinya penurunan kinerja sektor pertanian. Oleh sebab itu, kebijakan alokasi anggaran yang dialirkan untuk sektor pertanian merupakan hal penting yang perlu diperhatikan agar tepat sasaran dan mampu meningkatkan kinerja sektor pertanian di provinsi Riau. Penelitian ini bertujuan untuk (1) menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan dan pengeluaran fiskal di Provinsi Riau; (2) menganalisis dampak perubahan penerimaan dan pengeluaran fiskal Pemerintah Daerah terhadap kinerja sektor pertanian di Provinsi Riau (3) merumuskan kebijakan fiskal yang tepat dilakukan untuk meningkatkan kinerja sektor pertanian di Provinsi Riau.

Penelitian sebelumnya tentang dampak desentralisasi fiskal terhadap kinerja fiskal daerah dan ketahanan pangan di Provinsi Jawa Barat dilakukan oleh Wiwiek Rindayati tahun

2007, menggunakan data panel tahun 1995-2005 dengan analisis deskriptif dan simultan, metode 2SLS. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa pendapatan sektor pertanian signifikan dipengaruhi positif oleh produksi gabah, tenaga kerja sektor pertanian, lag pendapatan sektor pertanian.

Faktor-faktor yang mempengaruhi tenaga kerja sektor pertanian adalah angkatan kerja dan upah sektor pertanian. Angkatan kerja yang meningkat diikuti oleh penyerapan tenaga kerja sektor pertanian yang semakin besar, sedangkan upah merupakan insentif bagi tenaga kerja sehingga semakin besar tingkat upah maka akan meningkatkan jumlah tenaga kerja yang terlibat pada sektor pertanian. Apabila pengeluaran sektor pertanian ditingkatkan maka akan terjadi peningkatan PDRB sektor pertanian maupun non pertanian, dan selanjutnya peningkatan tersebut juga meningkatkan pendapatan per kapita. Peningkatan pengeluaran sektor pertanian berdampak pada peningkatan kinerja perekonomian daerah, peningkatan kinerja ketahanan pangan, penurunan kemiskinan, dan peningkatan kinerja fiskal daerah. Peningkatan upah sektor pertanian berdampak pada penyerapan tenaga kerja sektor pertanian.

Selain itu, Darsono *et al* pada tahun 2008 melakukan penelitian tentang Analisis Fiskal terhadap Kinerja Sektor Pertanian dengan Penekanan Agroindustri di Indonesia, dimana penelitian tersebut bertujuan untuk mengkaji kinerja sektor pertanian dan agroindustri, mengkaji hubungan kebijakan fiskal dengan kinerja sektor pertanian dan kinerja agroindustri, mengkaji instrument kebijakan fiskal yang efektif mempengaruhi kinerja sektor pertanian dan kinerja agroindustri, serta mengkaji keterkaitan antara kinerja sektor pertanian dengan kinerja agroindustri pada kondisi fiskal di Indonesia. Dengan menggunakan data sekunder time series (1970.1-2005.4) dan variabel yang meliputi kebijakan fiskal, variabel investasi, variabel konsumsi, variabel kinerja sektor pertanian, dan variabel kinerja agroindustry, digunakan pendekatan model *Vector Auto Regressive* (VAR) untuk menjawab tujuan yang kedua setelah tujuan pertama dianalisis dengan nilai-nilai rasio konvensional. Tujuan ketiga dan keempat dianalisis dengan menggunakan metode IRF dan FEVD. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa kinerja sektor pertanian menurun mulai pertengahan

periode 1980-an sampai tahun 2005 untuk semua aspek dalam perekonomian dimana kesejahteraan petani tertekan oleh *over value* nilai tukar rupiah, selain itu kinerja agroindustri terutama daya saingnya juga mengalami penurunan pada periode 1990-an. Terkait dengan agroindustri kebijakan fiskal dalam jangka panjang yang paling kuat mempengaruhi kinerja sektor pertanian dan agroindustri adalah anggaran sektor pertanian, penelitian dan pengembangan pertanian, infrastruktur pertanian dan desentralisasi fiskal meskipun respon kinerja sektor pertanian dan agroindustri atas *shock instrument* kebijakan fiskal untuk mencapai keseimbangan relative lama, masing-masing 9 dan 8 tahun. Instrumen kebijakan fiskal yang efektif mempengaruhi kinerja sektor pertanian adalah anggaran pajak pertambahan nilai, anggaran penelitian dan pengembangan pertanian, anggaran infrastruktur, subsidi pertanian, dan desentralisasi fiskal. Sementara untuk agroindustri adalah pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, anggaran infrastruktur pertanian, dan desentralisasi fiskal. Keterkaitan antara sektor pertanian dengan agroindustri adalah adanya peran sektor pertanian dalam mempengaruhi variabilitas kinerja agroindustri melalui PDB pertanian, ekspor produk pertanian, dan impor produk pertanian.

Studi yang dilakukan oleh Akai dan Sakata (2002) di Amerika Serikat memperlihatkan bukti baru bahwa desentralisasi fiskal mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Dengan data *cross section* dan *time series* (panel data) maka terdapat 50 observasi (rata-rata tahun 1992-1994 untuk *time series* dan 50 negara bagian di Amerika Serikat). Penelitian empiris tersebut memperlihatkan desentralisasi fiskal memiliki kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi. Tidak seperti paper sebelumnya, paper ini menemukan bahwa desentralisasi fiskal memainkan peranan utama dalam pertumbuhan ekonomi. Namun penelitian ini juga mengindikasikan bahwa ada faktor-faktor lainnya yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi selain desentralisasi fiskal.

Saefudin (2005) meneliti tentang dampak desentralisasi fiskal terhadap kinerja perekonomian dan kelembagaan di Provinsi Riau. Alat analisis yang digunakan adalah ekonometrika terdiri dari 3 blok, yaitu blok penerimaan fiskal daerah, blok pengeluaran fiskal daerah, blok makroekonomi daerah, dengan

menggunakan *pool data* 5 kabupaten dan kota di Provinsi Riau pada tahun 1995-2000. Hasil penelitian menunjukkan bahwa evaluasi pelaksanaan sebelum dan sesudah desentralisasi fiskal dan kinerja fiskal daerah pada sisi penerimaan diketahui terjadi peningkatan dimana transfer dari pemerintah pusat memberi kontribusi besar, tetapi pada sisi pengeluaran menunjukkan alokasi pengeluaran rutin meningkat lebih tinggi daripada alokasi pengeluaran pembangunan. Penurunan alokasi pengeluaran pembangunan ditunjukkan oleh penurunan alokasi pengeluaran untuk sektor-sektor pembangunan khususnya sektor pertanian dan pelayanan fiskal umum. Kebijakan kenaikan dana alokasi umum dan bagi hasil bukan pajak dan realokasi pengeluaran rutin dan pembangunan mendorong pertumbuhan ekonomi, pemerataan pendapatan, penurunan kesenjangan antar daerah. Secara umum, eksekutif sebagai pelaksana kebijakan desentralisasi fiskal dan legislatif sebagai fungsi anggaran dan kontrol pemerintah daerah belum dapat menjalankan ketentuan Undang-Undang No.25 Tahun 1999 dengan baik. Secara administrasi dan ekonomi, pemerintah daerah belum mampu memberikan layanan publik dengan baik terbukti dengan belum adanya perubahan mendasar terhadap layanan publik, begitu juga pada kinerja administrasi, pengelolaan pembangunan dan kelembagaan daerah.

Dirgantoro (2010) melakukan penelitian mengenai dampak kebijakan desentralisasi fiskal terhadap transformasi struktur tenaga kerja di Provinsi Jawa Barat menggunakan data sekunder tahun 1975-2007 dengan metode pendugaan 2SLS. Berdasarkan latar belakang, perumusan masalah, dan pembahasan, diketahui bahwa Provinsi Jawa Barat mengalami transformasi struktur tenaga kerja selama berlangsungnya proses pembangunan. Kontribusi tenaga kerja di sektor pertanian menurun, kontribusi tenaga kerja sektor agroindustri meningkat, dan kontribusi sektor lainnya meningkat. Selama berlangsungnya transformasi struktur tenaga kerja, sektor pertanian tidak berkaitan erat dengan sektor agroindustri, tetapi berkaitan erat sektor lainnya. Penurunan kontribusi tenaga kerja di sektor pertanian tidak secara otomatis diikuti oleh peningkatan kontribusi tenaga kerja disektor agroindustri, tetapi diserap di sektor lainnya, seperti sektor informal. Peningkatan pengeluaran untuk

belanja pegawai dan penerimaan daerah dari DAU berdampak positif baik terhadap tenaga kerja sektor pertanian, total tenaga kerja, dan kontribusi tenaga kerja sektor pertanian meningkat. Peningkatan pengeluaran untuk sektor pertanian berdampak positif terhadap tenaga kerja pertanian dan terjadi peningkatan kontribusi tenaga kerja sektor pertanian, tetapi berdampak negatif terhadap total tenaga kerja. Peningkatan pengeluaran untuk infrastruktur berdampak positif terhadap tenaga kerja total, tetapi berdampak negatif pada tenaga kerja sektor pertanian dan kontribusi tenaga kerja sektor pertanian menjadi menurun, yang berarti terjadi transformasi di sektor pertanian.

Penelitian dilakukan oleh Yao-sen tentang Perubahan Fiskal Sektor Pertanian-Pengeluaran Pendukung dan Pendapatan Petani Berdasarkan Teori Grey Correlation menggunakan data tahun 2009. Hasil penelitian diantaranya menunjukkan bahwa pengaruh pengeluaran pendukung produksi pertanian terhadap pendapatan petani menunjukkan trend yang menurun, pengaruh peningkatan pendapatan petani menunjukkan kepercayaan dan peningkatan pengetahuan dan penggunaan teknologi.

Penelitian Wen-yan (2010) tentang dampak pengeluaran fiskal di China terhadap Pertanian dilihat dari pendapatan petani menunjukkan hasil bahwa peningkatan anggaran untuk ilmu pengetahuan dan teknologi memberikan dampak paling besar terhadap peningkatan pendapatan petani. Hal ini sesuai dengan penelitian Yao-sen yang juga dilakukan di China.

## METODE PENELITIAN

### Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa data series agregat Provinsi Riau tahun 1994-2013. Sumber data diperoleh dari BPS Nasional, BPS Provinsi Riau, Departemen Keuangan. Data yang dimasukkan dalam penelitian adalah pajak daerah (TAXD), retribusi daerah (RETRD), DAU, DAK, PAD, total penerimaan daerah (TPED), investasi sektor pertanian (INVSP), upah sektor pertanian (UPSP), dan penyerapan tenaga kerja sektor pertanian (PTKSP).

### Metode Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan ekonometrika dengan sistem persama-

an simultan dan metode estimasi *Two Stage Least Squares* (2SLS). Pengolahan data dilakukan menggunakan program Microsoft Excel 2013 dan SAS 9.1.3 Portable. Model dibentuk berdasarkan studi literatur yang diantaranya diacu dari Akai and Sakata (2002), Asnawi (2005), Saefudin (2005), Situmorang (2009), Salois (2010), Dirgantoro (2010), Sumedi (2013), Budiyo (2014) dan Lisna (2014). Model dalam penelitian ini terdiri dari 3 (tiga) blok yaitu blok penerimaan fiskal daerah, pengeluaran fiskal daerah, dan kinerja sektor pertanian.

### Blok Penerimaan Fiskal

1.  $TAXD = a_0 + a_1*PDRB + a_2*TEXP + a_3*KPDK + a_4*LTAXD + u_1$ ..... (1)
2.  $RETRD = b_0 + b_1*INFL + b_2*PDRB + b_3*DRETRD + u_2$ ..... (2)
3.  $PAD = TAXD + RETRD + LABUD$ ..(3)
4.  $DAU = c_0 + c_1*PDRB + c_2*TEXP + c_3*AKED + c_4*LDAU + u_3$ ..... (4)
5.  $BHTAXD = d_0 + d_1*PAD + d_2*PESE + d_3*LBHTAX + u_4$ ..... (5)
6.  $TPED = PAD + DAU + DAK + BHTAXD + BHPESDA + PELA + SAPBDTS$ ..... (6)

### Blok Pengeluaran Fiskal

7.  $PERGA = e_0 + e_1*PAD + e_2*DAU + e_3*DAK + e_4*JPGR + e_5*LPERGA + u_5$ ..... (7)
8.  $PERNGA = f_0 + f_1*PAD + f_2*SAPBDTS + f_3*POP + u_6$ ..... (8)
9.  $PERDA = PERGA + PERNGA$ ..... (9)
10.  $PESPER = g_0 + g_1*TPED + g_2*PTKSP + g_3*LPESPER + u_7$ ..... (10)
11.  $PESNPER = h_0 + h_1*TPED + h_2*PTKSP + h_3*LPESNPER + u_8$ ..... (11)
12.  $PEINF = i_0 + i_1*TPED + i_2*PDRB + i_3*KPDK + u_9$ ..... (12)
13.  $PESE = PESPER + PESNPER + PEINF$ ..... (13)
14.  $TEXP = PERDA + PESE + PEINF$ . (14)

### Blok Kinerja Sektor Pertanian

15.  $PDRBSTP = l_0 + l_1*TEXP + l_2*PTKSTP + l_3*LPDRBSTP + u_{12}$ ..... (15)
16.  $PDRBSPK = m_0 + m_1*INVSPK + m_2*PTKSPK + m_3*LPDRBSPK + u_{13}$ ..... (16)

17.  $PDRBSPT = n_0 + n_1 * INVSPT + n_2 * PTKSPT + n_3 * LPDRBSPT + u_{14} \dots \dots \dots (17)$
18.  $PDRBSIK = o_0 + o_1 * TEXP + o_2 * PTKSIK + o_3 * PESPER + o_4 * LPDRBSIK + u_{15} \dots (18)$
19.  $PDRBSKH = p_0 + p_1 * INVSKH + p_2 * PTKSKH + p_3 * PESPER + u_{16} \dots \dots (19)$
20.  $PDRBSP = PDRBSTP + PDRBSPK + PDRBSPT + PDRBSIK + PDRBSK \dots (20)$
21.  $PTKSTP = u_0 + u_1 * UPSTP + u_2 * PRSTP + u_3 * PDRBSTP + u_4 * TEXP + u_{22} \dots \dots (21)$
22.  $PTKSPK = v_0 + v_1 * UPSPK + v_2 * PRSPK + v_3 * PDRBSPK + v_4 * TEXP + u_{23} \dots \dots (22)$
23.  $PTKSPT = w_0 + w_1 * UPSPT + w_2 * PRSPT + w_3 * PDRBSPT + w_4 * TEXP + u_{23} \dots \dots (23)$
24.  $PTKSIK = x_0 + x_1 * UPSIK + x_2 * PRSIK + x_3 * PDRBSIK + x_4 * TEXP + u_{24} \dots \dots (24)$
25.  $PTKSKH = y_0 + y_1 * UPSKH + y_2 * PRSKH + y_3 * PDRBSKH + y_4 * TEXP + u_{25} \dots \dots (25)$
26.  $PTKSP = PTKSTP + PTKSPK + PTKSPT + PTKSIK + PTKSKH \dots \dots \dots (26)$

## Keterangan:

TAXD	= Pajak Daerah (Rp Juta)
RETRD	= Retribusi Daerah (Rp Juta)
PAD	= Pendapatan Asli Daerah (Rp Juta)
DAU	= Dana Alokasi Umum (Rp Juta)
DAK	= Dana Alokasi Khusus (Rp Juta)
BHTAXD	= Bagi Hasil Pajak (Rp Juta);
BHPESDA	= Bagi Hasil Sumber Daya Alam (Rp Juta)
TPED	= Total Penerimaan Daerah (Rp Juta)
PERGA	= Pengeluaran Rutin Gaji (Rp Juta)
PERNGA	= Pengeluaran Rutin Non Gaji (Rp Juta)
PERDA	= Pengeluaran Rutin Daerah (Rp Juta)
PESPER	= Pengeluaran Sektor Pertanian (Rp Juta)
PESNPER	= Pengeluaran Sektor Non Pertanian (Rp Juta)
PEINF	= Pengeluaran Infrastruktur (Rp Juta)
PESE	= Pengeluaran Sektor Ekonomi (Rp Juta)
TEXP	= Total Pengeluaran Daerah (Rp Juta)
PDRBSP	= PDRB Subsektor Pertanian (Rp Juta)

PDRBSTP	= PDRB Subsektor Tanaman Pangan (Rp Juta)
PDRBSPK	= PDRB Subsektor Perkebunan (Rp Juta)
PDRBSPT	= PDRB Subsektor Peternakan (Rp Juta)
PDRBSKH	= PDRB Subsektor Kehutanan (Rp Juta)
PDRBSIK	= PDRB Subsektor Perikanan (Rp Juta)
PTKSP	= Penyerapan Tenaga kerja Sektor Pertanian (orang)
PTKSTP	= Penyerapan Tenaga kerja Subsektor Tanaman Pangan (orang)
PTKSPK	= Penyerapan Tenaga kerja Subsektor Perkebunan (orang)
PTKSPT	= Penyerapan Tenaga kerja Subsektor Peternakan (orang)
PTKSKH	= Penyerapan Tenaga kerja Subsektor Kehutanan (orang)
PTKSIK	= Penyerapan Tenaga kerja Subsektor Perikanan (orang)
LABUD	= Laba Badan Usaha Milik Daerah (Rp Juta)
PDRB	= Produk Domestik Regional Bruto (Rp Juta)
JPGO	= Jumlah Pegawai Negeri Otonom (orang)
PTKSNP	= Penyerapan Tengaakerja Sektor Non Pertanian (orang)
LWIL	= Luas Wilayah (km)
KPKDK	= Kepadatan Penduduk (jiwa/km)
POP	= Jumlah Penduduk (jiwa)
SBI	= Suku Bunga (persen per tahun)
INFL	= Inflasi (persen per tahun)
UPSP	= Upah Sektor Pertanian (Rp Juta)
UPSTP	= Upah Subsektor Tanaman Pangan (Rp Juta)
UPSPK	= Upah Subsektor Perkebunan (Rp Juta)
UPSPT	= Upah Subsektor Peternakan (Rp Juta)
UPSKH	= Upah Subsektor Kehutanan (Rp Juta)
UPSIK	= Upah Subsektor Perikanan (Rp Juta)
PRSP	= Produksi Pertanian (Rp Juta)
PRSTP	= Produksi Subsektor Tanaman Pangan (Rp Juta)
PRSPK	= Produksi Subsektor Perkebunan (Rp Juta)
PRSPT	= Produksi Subsektor Peternakan (Rp Juta)

PRSKH = Produksi Subsektor Kehutanan (Rp  
Juta)  
PRSIK = Produksi Subsektor Perikanan (Rp  
Juta)  
u = Komponen error.

Identifikasi model ditentukan atas dasar *order condition* sebagai syarat keharusan dan *rank condition* sebagai syarat kecukupan. Menurut Koutsoyiannis (1982, hal 358), hasil identifikasi untuk setiap persamaan struktural haruslah *exactly identified* atau *over identified* untuk dapat menduga parameter-parameternya. Syarat kecukupan dituangkan dalam *rank condition* untuk identifikasi yang menyatakan bahwa dalam suatu persamaan teridentifikasi jika dan hanya jika dimungkinkan untuk membentuk minimal satu determinan bukan nol pada order (G-1) dari parameter struktural peubah yang tidak termasuk dalam persamaan tersebut.

Tahapan identifikasi model meliputi 26 persamaan (G) yang terdiri dari 66 variabel atau peubah (K) serta 8 variabel dalam suatu persamaan (M) sehingga  $K - M = 58$  dan  $G - 1 = 25$ , maka  $(K - M) > (G - 1)$ . Oleh sebab itu berdasarkan kriteria *order condition* maka persamaan dinyatakan teridentifikasi secara berlebih (*over identified*) sehingga dapat diduga parameter-parameternya.

Selanjutnya dilakukan tahap validasi model yang bertujuan untuk mengevaluasi apakah nilai estimasi sesuai dengan nilai aktual masing-masing variabel endogen (Pindyck dan Rubinfeld, 1991). Apabila model sudah valid maka dapat dilanjutkan ke tahap simulasi kebijakan. Analisis simulasi dampak kebijakan dilakukan pada periode historis tahun 2006-2013. Simulasi 1 adalah peningkatan Dana Alokasi Umum (DAU) 5%, simulasi 2 adalah peningkatan Bagi Hasil Pajak Daerah (BHTAXD) 5%, simulasi 3 adalah peningkatan pengeluaran sektor pertanian (PESPER) 10% dan simulasi 4 adalah kombinasi kebijakan peningkatan PESPER 10% dan pengeluaran infrastruktur (PEINF) 5%.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil estimasi model ekonometrika dibagi menjadi 3 (tiga) blok yaitu blok penerimaan fiskal, blok pengeluaran fiskal, dan blok kinerja sektor pertanian Provinsi Riau. Keragaan secara umum hasil estimasi dalam 3 blok tersebut

menunjukkan hasil yang baik. Variabel eksogen dalam persamaan memiliki tanda yang sesuai dengan harapan berdasarkan teori ekonomi. Berdasarkan kriteria statistika lebih dari 70% persamaan dalam model memiliki nilai  $R^2$  diatas 0,90. Nilai DW berada diantara 0,9 – 2,4 dan taraf nyata variabel eksogen adalah  $\alpha < 25\%$ . Secara umum hasil analisis menunjukkan variabel eksogen dan predetermned memiliki hasil yang sesuai dengan fakta dilapangan dan logis.

Hasil statistik t menunjukkan terdapat variabel *predetermined* yang tidak berpengaruh nyata pada taraf nyata 25%. Namun hasil estimasi tetap representatif dalam menunjukkan kinerja sektor pertanian sebagai dampak kebijakan fiskal di Provinsi Riau. Tanda dan besaran parameter estimasi secara teoritis dan logis telah cukup sesuai dan memperkuat untuk analisis selanjutnya. Model fiskal Provinsi Riau telah melalui tahap validasi dengan rentang waktu selama 8 tahun, yakni tahun 2006-2013 secara agregat Provinsi Riau. Indikator validasi statistik yang digunakan adalah RMSPE (*Root Means Squares Percent Error*) dan nilai U Theil's (*Theil's Inequality Coefficient*). Secara keseluruhan hasil validasi cukup baik sehingga model dapat digunakan untuk simulasi.

## Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Fiskal Daerah

Blok penerimaan fiskal daerah Provinsi Riau ditunjukkan oleh pajak daerah (TAXD), retribusi daerah (RETRD), Dana Alokasi Umum (DAU), dana bagi hasil pajak daerah (BHTAXD). Hasil estimasi pada Tabel 2 menunjukkan bahwa Pajak daerah (TAXD) dipengaruhi oleh variabel PDRB, total pengeluaran daerah (TEXP), kepadatan penduduk (KPDK), dan pajak daerah tahun sebelumnya (LTAXD).

Pada Tabel 2, variabel yang secara signifikan berpengaruh nyata dan bernilai positif adalah PDRB, sedangkan variabel lainnya tidak memberikan pengaruh yang signifikan. Selanjutnya, pada retribusi daerah (RETRD), variabel penjelas memberikan pengaruh positif dan signifikan adalah PDRB dan delta retribusi daerah (DRETRD). Variabel penjelas lainnya yaitu inflasi (INFL) memberikan pengaruh positif namun tidak signifikan. Semakin besar PDRB Provinsi Riau menyebabkan peningkatan restribusi daerah dengan respon jangka pendek

Tabel 2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Fiskal Provinsi Riau

Pajak Daerah					
Peubah	Parm Est	Prob>   T	Elastisitas		
			SR	LR	
Intercept	-109799	0.7587			
PDRB	0.0030	0.0053*	0.738	0.74	
TEXP	0.0019	0.3995	0.005	0.006	
KPDK	464.49	0.9602	0.035	-7.662	
LTAXD	0.1067	0.6448			
R <sup>2</sup> =0.75094 DW=1.67 $\alpha$ =1%					
Retribusi Daerah					
Peubah	Parm Est	Prob>   T	Elastisitas		
			SR	LR	
Intercept	8755.3	0.1615			
INFL	16.319	0.9399	0.008		
PDRB	0.0001	0.0025*	0.571		
DRETRD	0.5491	0.0031*			
R <sup>2</sup> =0.62498 DW=0.91 $\alpha$ =1%					
Dana Alokasi Umum					
Peubah	Parm Est	Prob>   T	Elastisitas		
			SR	LR	
Intercept	-118001	0.3334			
PDRB	0.0021	0.0007*	1.156		
LWIL	13.956	0.3036	0.03		
POP	0.0614	0.6203	445.1		
TEXP	-0.0047	0.0124*	-0.02		
R <sup>2</sup> =0.72716 DW=2.01 $\alpha$ *=1%					
Bagi Hasil Pajak Daerah					
Peubah	Parm Est	Prob>   T	Elastisitas		
			SR	LR	
Intercept	8827.6	0.7572			
PAD	0.1221	0.0120*	4.827	5.499	
PESE	0.0009	0.2157**	6.864	6.87	
LBHTAXD	0.2367	0.2629			
R <sup>2</sup> =0.95800 DW=1.94 $\alpha$ *=5% $\alpha$ **=25%					

yang tidak elastis. Hal ini dikarenakan pemerintah daerah berusaha meningkatkan penerimaan fiskal daerah melalui mekanisme retribusi. Sementara inflasi memberikan pengaruh yang positif namun tidak signifikan terhadap meningkatnya retribusi daerah.

Selanjutnya, pada estimasi DAU, total pengeluaran pemerintah (TEXP) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap perubahan DAU dengan respon yang elastis dalam jangka pendek, artinya semakin besar pengeluaran pemerintah maka alokasi DAU untuk Provinsi Riau semakin kecil. Sementara PDRB memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap DAU. Hal ini berarti semakin besar PDRB menyebabkan alokasi dana pemerintah pusat untuk

pemerintah daerah Provinsi Riau melalui DAU semakin besar. Variabel penjas yang secara langsung mempengaruhi bagi hasil pajak daerah (BHTAXD) adalah pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pengeluaran sektor ekonomi (PESE).

Hasil estimasi pada Tabel 2 menunjukkan bahwa hampir seluruh penerimaan daerah yang terdiri dari pajak, retribusi, DAU dipengaruhi secara positif dan signifikan oleh PDRB. Kenaikan pajak dan retribusi merupakan cara pemerintah daerah untuk meningkatkan kapasitas penerimaan fiskal daerahnya. Pada variabel bagi hasil pajak daerah, PAD dan pengeluaran sektor ekonomi berpengaruh secara positif dan signifikan. Artinya, dengan adanya peningkatan pada PAD dan pengeluaran sektor ekonomi



maka akan meningkatkan dana bagi hasil pajak daerah. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Wahyuni (2009) yang menyatakan bahwa volume perolehan pajak di daerah berkaitan erat dengan tingkat pendapatan sehingga daerah dengan tingkat pendapatan tinggi akan memperoleh dana bagi hasil pajak yang lebih tinggi pula.

Penerimaan daerah yang berasal dari DAU akan menurun jika total pengeluaran daerah meningkat karena semakin tinggi pendapatan suatu daerah maka kegiatan perekonomian semakin baik ditandai dengan meningkatnya pengeluaran daerah sehingga daerah tersebut semakin mandiri dalam mencukupi kebutuhan fiskalnya.

### **Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pengeluaran Fiskal Daerah**

Blok pengeluaran fiskal daerah Provinsi Riau ditunjukkan oleh pengeluaran rutin gaji (PERGA), pengeluaran rutin non gaji (PERNGA), pengeluaran sektor pertanian (PESPER), pengeluaran sektor non pertanian (PESNPER), dan pengeluaran infrastruktur (PEINF).

Pada pengeluaran rutin gaji (PERGA), variabel yang berpengaruh positif dan signifikan adalah pendapatan asli daerah (PAD) dan pengeluaran rutin gaji tahun sebelumnya (LPERGA). Dana alokasi umum (DAU) memberikan pengaruh yang negatif dan signifikan terhadap pengeluaran rutin gaji. Sedangkan variabel jumlah pegawai otonom (JPGO) memberikan pengaruh yang positif namun tidak signifikan terhadap pengeluaran rutin gaji.

Semakin besar PAD maka pemerintah daerah berusaha untuk meningkatkan mekanisme fiskal daerah melalui pengeluaran rutin terutama pengeluaran gaji (PERGA). Hal ini mengindikasikan bahwa alokasi ketersediaan fiskal yang berasal dari pengeluaran rutin gaji bergantung kepada pendapatan asli daerah (PAD) dimana semakin besar PAD Provinsi Riau menyebabkan meningkatnya pengeluaran rutin gaji. Peningkatan tersebut seiring dengan semakin bertambahnya jumlah pegawai otonom dari tahun ke tahun.

Pada pengeluaran rutin non gaji (PERNGA), seluruh variabel berpengaruh positif dan signifikan, yaitu pendapatan asli daerah (PAD), sisa anggaran tahun sebelumnya (SAPBDTS), dan jumlah penduduk (POP).

Pengeluaran rutin non gaji responsif terhadap perubahan PAD dan populasi namun tidak responsif terhadap perubahan SAPBDTS pada jangka pendek.

Pada pengeluaran sektor pertanian (PESPER), variabel penjelas yang secara positif berpengaruh signifikan adalah total penerimaan daerah (TPED) dengan pengaruh yang tidak elastis dalam jangka pendek namun elastis dalam jangka panjang. Variabel penyerapan tenaga kerja sektor pertanian (PTKSP) dan pengeluaran sektor pertanian tahun sebelumnya (LPESPER) memberikan pengaruh yang positif namun tidak secara langsung pengaruhnya terhadap pengeluaran sektor pertanian.

Pengeluaran sektor non pertanian (PTKSNP) dipengaruhi oleh total penerimaan daerah (TPED) dan penyerapan tenaga kerja sektor non pertanian (PTKSNP) dengan pengaruh positif yang signifikan namun tidak elastis. Sedangkan variabel pengeluaran sektor non pertanian tahun sebelumnya (LPESNPER) berpengaruh positif namun tidak signifikan.

Pengeluaran infrastruktur (PEINF) dipengaruhi dengan pengaruh yang positif dan signifikan oleh total penerimaan daerah (TPED) dan kepadatan penduduk (KPDK). Sedangkan PDRB memberikan pengaruh yang positif namun kurang signifikan terhadap pengeluaran infrastruktur. Total penerimaan daerah (TPED) dan kepadatan penduduk (KPDK) berpengaruh positif dan signifikan serta masing-masing memiliki respon yang tidak elastis dan elastis terhadap pengeluaran infrastruktur (PEINF). Sedangkan PDRB memberikan pengaruh yang positif namun tidak signifikan terhadap pengeluaran infrastruktur (PEINF). Hal tersebut menunjukkan bahwa semakin besar anggaran yang berasal dari penerimaan daerah dan semakin tinggi kepadatan penduduk, maka anggaran yang dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur akan meningkat.

Peningkatan anggaran untuk pengeluaran infrastruktur perlu dilakukan melalui mekanisme fiskal karena masih minimnya infrastruktur di Provinsi Riau khususnya transportasi/ jalan. Hal ini menyebabkan terhambatnya kegiatan ekonomi sehingga laju pertumbuhannya pun mengalami perlambatan. Ketika mobilisasi dan distribusi terhambat maka akan berpengaruh terhadap kegiatan operasional distribusi sektor pertanian maupun non pertanian. Oleh sebab itu

Tabel 3 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pengeluaran Fiskal Provinsi Riau

Pengeluaran Rutin Gaji (PERGA)				
Peubah	Parm Est	Prob>   T	Elastisitas	
			SR	LR
Intercept	38778.2	0.0507		
PAD	0.133	0.1359**	0.239	0.300
DAU	-0.195	0.1492**	-0.069	-0.057
JPGO	1.583	0.4605	0.164	-0.281
LPERGA	0.592	0.0157*		
R <sup>2</sup> =0.98194 DW=2.03 α*=5% α*=15%				
Pengeluaran Rutin Non Gaji (PERNGA)				
Peubah	Parm Est	Prob>   T	Elastisitas	
			SR	LR
Intercept	382652	0.0026		
PAD	1.4416	0.071*	32.23	
DAU	0.2476	0.840	0.72	
SAPBDTS	2.8176	0.18**	0.68	
POP	0.0414	0.11**	6.537	
R <sup>2</sup> =0.62498 DW=2.22 α=5% α=20%				
Pengeluaran Sektor Pertanian (PESPER)				
Peubah	Parm Est	Prob>   T	Elastisitas	
			SR	LR
Intercept	-701123	0.714		
TPED	0.847	0.001*	0.610	4.007
PTKSP	-0.015	0.502	0.004	0.005
LPESPER	0.085	0.691		
R <sup>2</sup> =0.91619 DW=2.14 α*=1%				
Pengeluaran Non Pertanian (PESNPER)				
Peubah	Parm Est	Prob>   T	Elastisitas	
			SR	LR
Intercept	-1121085	0.5387		
TPED	0.808	<0001*	0.553	
PTKSNP	2.524	0.0247*	0.795	
PTKSP	-0.003	0.8688	-0.001	
R <sup>2</sup> =0.93478 DW=2.19 α*=5%				
Pengeluaran Infrastruktur (PEINF)				
Peubah	Parm Est	Prob>   T	Elastisitas	
			SR	LR
Intercept	-7.14E8	0.045		
TPED	7.529	0.194**	0.188	
PDRB	0.081	0.268	0.148	
KPDK	2443921	0.004*	1.397	
R <sup>2</sup> =0.91619 DW=2.14 α*=1%				

alokasi anggaran APBD untuk peningkatan infrastruktur penting untuk dilakukan.

#### Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kinerja Sektor Pertanian Provinsi Riau

Berdasarkan hasil estimasi yang ditunjukkan pada Tabel 4, Produk Domestik Regional Bruto Sektor Tanaman Pangan (PDRBSTP) dipengaruhi dengan pengaruh positif dan signifikan oleh total pengeluaran daerah (TEXP), penyerapan tenaga kerja subsektor tanaman pangan (PTKSTP) dan PDRBSTP tahun

sebelumnya (LPDRBSTP). Variabel-variabel tersebut tidak responsif pengaruhnya terhadap PDRB subsektor tanaman pangan dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

PDRB subsektor perkebunan dipengaruhi secara positif namun tidak signifikan oleh investasi subsektor perkebunan (INVSPK). Sementara variabel penyerapan tenaga kerja sektor perkebunan (PTKSPK) dan variabel PDRBSPK tahun sebelumnya berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDRBSPK.

PDRB subsektor peternakan dipengaruhi secara positif dan signifikan oleh penyerapan tenaga kerja subsektor peternakan (PTKSPT) dan PDRBSPT tahun sebelumnya namun bersifat tidak responsif baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Variabel yang secara positif dan signifikan mempengaruhi PDRB subsektor kehutanan adalah penyerapan tenaga kerja subsektor kehutanan (PTKSKH) dan PDRBSKH tahun sebelumnya.

Pengaruh PTKSKH bersifat tidak elastis dalam jangka pendek namun elastis dalam jangka panjang. Sementara investasi subsektor kehutanan (INVSKH) berpengaruh secara negatif dan pengeluaran sektor pertanian (PESPER) berpengaruh secara positif dimana keduanya memberikan pengaruh yang tidak signifikan.

Variabel yang secara positif dan signifikan mempengaruhi PDRB subsektor perikanan (PDRBSIK) adalah total pengeluaran (TEXP), penyerapan tenaga kerja subsektor perikanan (PTKSIK) dan PDRB subsektor perikanan tahun sebelumnya. Variabel-variabel tersebut bersifat tidak elastis dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Sementara pengeluaran sektor pertanian (PESPER) berpengaruh secara positif namun tidak signifikan.

PDRB subsektor tanaman pangan dan perikanan meningkat dengan adanya peningkatan pada total pengeluaran pemerintah dan penyerapan tenaga kerja. Begitu juga dengan PDRB subsektor perkebunan dan kehutanan yang meningkat seiring dengan meningkatnya penyerapan tenaga kerja.

Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa subsektor-subsektor tersebut mampu menyerap banyak tenaga kerja yang produktif dengan adanya dukungan alokasi anggaran sehingga peningkatan pengeluaran berdampak pada peningkatan PDRB. Adanya peningkatan penyerapan tenaga kerja tersebut mampu meningkatkan output produksi yang optimal dan berkontribusi bagi PDRB sektor pertanian. Berbeda dengan subsektor peternakan, dimana ketika terjadi peningkatan penyerapan tenaga kerja maka produktivitas tidak ikut meningkat sehingga menurunkan PDRB subsektor peternakan. Sementara investasi subsektor peternakan (INVSPT) berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap PDRBSPT.

Variabel yang berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja

subsektor tanaman pangan (PTKSTP) adalah upah tenaga kerja subsektor tanaman pangan (UPSTP) dan produk domestik regional bruto subsektor tanaman pangan (PDRBSTP). Sementara total pengeluaran daerah (TEXP) memberikan pengaruh yang negatif. Penyerapan tenaga kerja subsektor tanaman pangan bersifat tidak responsif terhadap perubahan variabel-variabel tersebut. Variabel produksi subsektor tanaman pangan (PRSTP) memberikan pengaruh yang negatif dan tidak signifikan. Penyerapan tenaga kerja subsektor tanaman pangan bersifat tidak responsif terhadap seluruh variabel penjelas. Semakin tinggi upah subsektor tanaman pangan akan meningkatkan penyerapan tenaga kerja subsektor tanaman pangan. Hal ini terjadi karena upah yang tinggi dapat menarik minat masyarakat untuk bekerja pada subsektor tersebut.

Selain itu, PDRB subsektor tanaman pangan dan total pengeluaran daerah yang mengalami kenaikan juga menyebabkan meningkatnya penyerapan tenaga kerja subsektor tanaman pangan. Hal ini disebabkan karena subsektor tanaman pangan berperan penting dalam pemenuhan kebutuhan pangan daerah sehingga produksinya perlu untuk ditingkatkan.

Penyerapan tenaga kerja subsektor perkebunan dipengaruhi signifikan oleh upah, dimana upah yang tinggi akan menarik minat masyarakat untuk bekerja pada subsektor tersebut. Kebijakan meningkatkan upah pada subsektor perkebunan di Provinsi Riau dilakukan karena subsektor tersebut berpotensi untuk ekspansi sehingga untuk menambah tenaga kerja dilakukan dengan kebijakan kenaikan upah. Selain itu, PDRB yang mengalami peningkatan juga menyebabkan naiknya penyerapan tenaga kerja. Berdasarkan hal tersebut diketahui bahwa penyerapan tenaga kerja subsektor perkebunan mendapat porsi yang cukup besar dari PDRB.

Pada aspek subsektor peternakan, variabel yang secara positif dan signifikan mempengaruhi penyerapan tenaga kerja subsektor peternakan (PTKSPT) adalah upah tenaga kerja subsektor peternakan (UPSPT) yang bersifat elastis, sementara total pengeluaran daerah (TEXP) berpengaruh secara negatif dan signifikan namun tidak elastis. Variabel produksi subsektor peternakan dan PDRB subsektor peternakan berpengaruh secara negatif dan tidak signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja subsektor peternakan. Semakin tinggi upah

Tabel 4. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kinerja Sektor Pertanian di Provinsi Riau

PDRB Subsektor Tanaman Pangan (PDRBSTP)					PDRB Subsektor Perkebunan (PDRBSPK)				
Peubah	Parm Est	Prob>  T	Elastisitas SR LR		Peubah	Parm Est	Prob>  T	Elastisitas SR LR	
Intercept	-393110	0.1245			Intercept	-40737	0.069		
TEXP	0.005	0.1598**	0.01	0.01	INVSPK	2362.1	0.493	0.06	-26E-06
PESPER	0.048	0.2949	0.07	0.08	PTKSPK	0.1774	0.020*	0.49	0.5467
PTKSTP	0.015	0.0678*	0.10	0.10	LPDRBSPK	0.9681	<001*		
LPDRBSTP	0.813	0.0005*			$R^2 = 0.99143$ DW=2.12 $\alpha=1\%$				
$R^2 = 0.9872$ DW=1.53 $\alpha=10\%$ $\alpha=20\%$					PDRB Subsektor Kehutanan (PDRBSKH)				
PDRB Subsektor Peternakan (PDRBSPT)					Intercept	-5509	0.5387		
Intercept	216569	0.06			INVSKH	-0.561	<0001*	-0.001	-0.001
TPED	-0.159	0.92	-0.01	-0.00	PTKSKH	0.296	0.0247*	0.785	1.116
PTKSPT	-0.036	0.15*	-0.13	-0.12	PESPER	-0.003	0.8688	0.049	0.057
LPESPER	1.120	<001*			LPDRBSKH	0.876	0.0825*		
$R^2 = 0.99306$ DW=1.32 $\alpha=1\%$					$R^2 = 0.99174$ DW=2.4 $\alpha=5\%$				
PDRB Subsektor Perikanan (PDRBSIK)					Penyerapan Tenaga Kerja Subsektor T. Pangan				
Intercept	32943	0.352			Intercept	1512946	0.0798		
TEXP	0.005	0.056*	0.003	0.003	UPSTP	121.63	<0001*	0.656	
PTKSIK	-0.053	0.124*	-1.179	-0.17	PRSTP	-0.4786	0.9697	-0.019	
PESPER	0.037	0.618	0.042	0.042	PDRBSTP	5.8058	0.0327*	0.851	
LPDRBSIK	0.988	<0001*			TEXP	0.0262	0.0013*	0.030	
$R^2 = 0.98821$ DW=2.4 $\alpha=15\%$					$R^2 = 0.99174$ DW=2.4 $\alpha=5\%$				
Penyerapan Tenaga Kerja Subsektor Perkebunan					Penyerapan Tenaga Kerja Subsektor Peternakan				
Intercept	-15282	<.0001			Intercept	2455512	<0001*		
UPSPK	101.07	0.001*	-1.72		UPSPT	158.458	<0001*	1.034	
PRSPK	-1.3130	0.292	-0.34		PRSPT	-0.0009	0.8267	-0.012	
PDRBSPK	-0.3187	0.037*	5.68		PDRBSPT	-0.0234	0.9341	-0.006	
TEXP	0.0373	0.617	-4.16		TEXP	-0.0238	0.0006*	-0.012	
$R^2 = 0.95462$ DW=2.03 $\alpha=5\%$					$R^2 = 0.90004$ DW=2.36 $\alpha=5\%$				
Penyerapan Tenaga Kerja Subsektor Kehutanan					Penyerapan Tenaga Kerja Subsektor Perikanan				
Intercept	13723603	<0001			Intercept	6926967	<0001		
UPSKH	74.074	0.007*	-1.72		UPSIK	167.365	0.0002*	1.123	
PRSKH	-0.010	0.871	-0.34		PRSIK	-4.1769	0.4481	-3.601	
PDRBSKH	-0.036	0.822	5.68		PDRBSIK	-0.0276	0.9171	0.008	
TEXP	-0.017	0.608	-4.16		TEXP	-0.0677	0.0019*	-0.014	
$R^2 = 0.94673$ DW=2.24 $\alpha=1\%$					$R^2 = 0.75094$ DW=2.1 $\alpha=1\%$				

tenagakerja subsektor peternakan menyebabkan kenaikan pada penyerapan tenaga kerja subsektor peternakan. Sementara kenaikan pada total pengeluaran daerah dapat menyebabkan turunnya penyerapan tenaga kerja subsektor peternakan. Hal ini mengindikasikan bahwa pengeluaran daerah dialokasikan lebih banyak ke subsektor lain selain subsektor peternakan.

Pada aspek penyerapan tenaga kerja subsektor kehutanan (PTKSKH), variabel yang berpengaruh positif dan signifikan adalah upah tenaga kerja subsektor kehutanan (UPSKH), namun penyerapan tenaga kerja subsektor kehutanan tidak responsif dengan perubahan variabel upah. Sementara produksi subsektor kehutanan (PRSKH), PDRB subsektor kehutanan, dan total pengeluaran daerah (TEXP)

seluruhnya berpengaruh secara negatif dan tidak signifikan. Semakin tinggi upah subsektor kehutanan akan menyebabkan tingginya penyerapan tenaga kerja subsektor tersebut. Hal ini seiring dengan subsektor tanaman pangan, perkebunan, dan peternakan, dimana upah yang tinggi dapat menarik minat masyarakat untuk bekerja pada subsektor tersebut. Pada aspek penyerapan tenaga kerja subsektor perikanan (PTKSIK), variabel yang berpengaruh positif dan signifikan mempengaruhi adalah upah tenaga kerja subsektor perikanan (UPSIK). Sementara perubahan total pengeluaran daerah (TEXP) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja subsektor perikanan.

Penyerapan tenaga kerja subsektor perikanan responsif terhadap perubahan upah

Tabel 5. Dampak Perubahan Kebijakan terhadap Penerimaan dan Pengeluaran Fiskal di Provinsi Riau

Simulasi Variabel	1 (%)	2 (%)	3 (%)	4 (%)
Penerimaan				
a. TEXP	0.05	0.17	0.19	4.89
b. RETRD	0.00	0.00	0.00	0.00
c. PAD	0.04	0.15	0.17	4.37
d. DAU		-2.03	-1.98	-155.2
e. BHTAXD	0.08		0.40	10.2
f. TPED	0.80	2.48	-0.05	-1.91
Pengeluaran				
a. PERGA	-0.81	0.19	0.19	5.56
b. PERNGA	0.01	0.03	0.04	1.02
c. PERDA	-0.08	0.05	0.06	1.57
d. PESPER	0.56	1.99		
e. PESNPER	0.52	1.62	-0.03	-1.23
f. PEINF	0.20	0.64	-0.01	
g. PESE	0.23	0.73	0.80	17.7
h. TEXP	0.21	0.69	0.76	17.1

namun tidak terhadap perubahan total pengeluaran daerah. Sedangkan produksi subsektor perikanan (PRSIK) dan PDRB subsektor perikanan (PDRBSIK) berpengaruh secara negatif dan tidak signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja subsektor perikanan. Adanya desentralisasi fiskal, pemerintah daerah memiliki wewenang untuk melakukan mekanisme fiskal yang mendukung kinerja sektor pertanian. Secara keseluruhan, kinerja sektor pertanian di Provinsi Riau dipengaruhi secara positif dan signifikan oleh upah, dimana upah yang tinggi dapat meningkatkan penyerapan tenaga kerja sektor pertanian.

### Dampak Kebijakan Fiskal

#### Dampak Perubahan Kebijakan terhadap Penerimaan dan Pengeluaran Fiskal di Provinsi Riau

Kebijakan peningkatan DAU sebesar 5 persen berdampak pada meningkatnya total penerimaan dan pengeluaran fiskal daerah. Total penerimaan daerah meningkat sebesar 0.80 persen dan total pengeluaran daerah meningkat sebesar 0.21 persen. Daerah yang memiliki potensi fiskal besar tetapi kebutuhan fiskalnya kecil akan memperoleh DAU yang relatif kecil. Sebaliknya, daerah yang memiliki potensi fiskal kecil tetapi kebutuhan fiskalnya besar akan memperoleh alokasi DAU yang relatif besar. Hal tersebut menyebabkan pemerintah daerah berupaya meningkatkan PAD

yang berasal dari pajak dan retribusi agar tidak tergantung pada DAU. Adanya kebijakan peningkatan pengeluaran sektor pertanian sebesar 10 persen menyebabkan total penerimaan daerah mengalami penurunan seiring dengan adanya penurunan pada DAU sedangkan total pengeluaran daerah mengalami peningkatan. Hal ini perlu diperhatikan agar daerah semakin mandiri dalam memenuhi kebutuhan bagi pembangunan daerah.

Kombinasi kebijakan peningkatan pengeluaran sektor pertanian dan infrastruktur masing-masing sebesar 10 persen dan 5 persen menyebabkan total penerimaan daerah menurun, sementara total pengeluaran daerah mengalami peningkatan, sama halnya dengan dampak yang terjadi pada kebijakan peningkatan pengeluaran sektor pertanian sebesar 5 persen. Dampak peningkatan terbesar pada pengeluaran daerah terjadi pada pengeluaran sektor ekonomi. Porsi anggaran untuk pengeluaran sektor non pertanian menurun karena kebijakan ini menyebabkan porsi anggaran untuk pertanian dan infrastruktur meningkat.

#### Dampak Perubahan Kebijakan terhadap Kinerja Sektor Pertanian di Provinsi Riau

Pada Tabel 6, dapat dilihat bahwa subsektor perkebunan memiliki dampak positif atau peningkatan yang paling banyak dibandingkan dengan subsektor lain. Hal ini mengindikasikan bahwa alokasi dana fiskal yang dianggarkan

Tabel 6. Dampak Perubahan Kebijakan terhadap Kinerja Sektor Pertanian di Provinsi Riau

Aspek \ Simulasi	1 (%)	2 (%)	3 (%)	4 (%)
PDRB	0.09	0.48	0.67	0.02
a. Tanaman Pangan	0.01	0.98	0.38	0.03
b. Perkebunan	0.00	0.02	0.00	0.01
c. Peternakan	0.01	0.33	0.06	0.01
d. Kehutanan	0.27	0.97	2.33	0.05
e. Perikanan	0.01	1.12	0.45	0.03
Penyerapan Tenaga Kerja	-0.10	-0.14	0.16	-0.01
a. Tanaman Pangan	-1.31	-0.89	2.32	-0.10
b. Perkebunan	0.03	0.08	0.02	0.03
c. Peternakan	-0.24	-0.80	-0.17	-0.04
d. Kehutanan	-0.03	-0.08	-0.07	-0.02
e. Perikanan	-0.25	-0.84	-0.17	-0.04

untuk subsektor perkebunan lebih banyak dibandingkan subsektor lainnya. Oleh sebab itu, pemerintah daerah perlu memperhatikan subsektor selain perkebunan yang perlu ditingkatkan pertumbuhannya seperti subsektor tanaman pangan dimana pertumbuhannya mengalami penurunan akibat alih fungsi lahan sehingga pangan sebagai kebutuhan utama masyarakat mengalami penurunan output.

PDRB sektor pertanian meningkat pada seluruh simulasi. Ini mengindikasikan bahwa seluruh simulasi yang dilakukan merupakan mekanisme kebijakan fiskal yang mendukung sektor pertanian di Provinsi Riau. Peningkatan PDRB sektor pertanian paling tinggi terjadi pada simulasi 3 yaitu kebijakan peningkatan pengeluaran sektor pertanian sebesar 10 persen, dimana dampak kebijakan tersebut terhadap PDRB sektor pertanian adalah meningkat sebesar 0,67 persen.

Selain itu, berdasarkan aspek kinerja sektor pertanian lainnya yaitu penyerapan tenaga kerja, kebijakan fiskal pada simulasi 3 juga meningkatkan penyerapan tenaga kerja sektor pertanian sebesar 0,16 persen. Kebijakan tersebut dapat mendorong terbukanya kesempatan kerja bagi masyarakat bukan hanya pada subsektor perkebunan, tetapi juga subsektor tanaman pangan. Subsektor tanaman pangan merupakan subsektor yang perlu untuk lebih diperhatikan dari sisi kinerjanya disebabkan penurunan outputnya dari tahun ke tahun dengan disertai perlambatan pertumbuhan. Adanya alih fungsi lahan dan transformasi tenaga kerja merupakan salah satu penyebab menurunnya tren pertumbuhan subsektor tanaman pangan. Oleh sebab itu kebijakan

peningkatan pengeluaran sektor pertanian merupakan kebijakan yang tepat untuk meningkatkan kinerja sektor pertanian di Provinsi Riau.

Kementerian pertanian saat ini mendorong kegiatan pertanian dengan menggunakan teknologi berupa benih dan bibit unggul, mesin pertanian, dan teknologi irigasi dalam rangka meningkatkan output pertanian (Kementerian Pertanian, 2013). Metode penanaman inovatif yang sesuai dengan kondisi keterbatasan dan alih fungsi lahan juga dapat diterapkan untuk meningkatkan output pertanian.

Adanya transformasi tenaga kerja yang terjadi di Provinsi Riau juga merupakan hal yang penting untuk diperhatikan agar sektor pertanian dapat menyerap tenaga kerja produktif yang dapat meningkatkan produktivitas pertanian. Untuk itu, diperlukan dukungan pemerintah melalui mekanisme fiskal peningkatan pengeluaran sektor pertanian dalam rangka peningkatan kinerja sektor pertanian Provinsi Riau.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

1. Faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan fiskal di Provinsi Riau adalah PDRB, PAD, dan pengeluaran sektor ekonomi dengan pengaruh yang positif dan signifikan, serta total pengeluaran daerah dengan pengaruh yang negatif dan signifikan. Sementara faktor-faktor yang mempengaruhi pengeluaran fiskal di Provinsi Riau adalah PAD, total penerimaan daerah, jumlah penduduk, kepadatan penduduk, dan sisa anggaran tahun sebelumnya dengan pengaruh yang positif dan signifikan, serta DAU dengan pengaruh yang negatif dan signifikan.

2. Perubahan kebijakan penerimaan dan pengeluaran fiskal berdampak positif terhadap kinerja sektor pertanian di Provinsi Riau dimana dampak positif terjadi paling besar pada subsektor tanaman pangan.
3. Kebijakan fiskal yang tepat dilakukan untuk meningkatkan kinerja sektor pertanian di Provinsi Riau adalah peningkatan pengeluaran sektor pertanian sebesar 10 persen, dimana dengan kebijakan tersebut tidak hanya meningkatkan PDRB sektor pertanian sebesar 0.67 persen, tetapi juga aspek penyerapan tenaga kerja sektor pertanian sebesar 0.16 persen.

### **Saran**

Sektor pertanian merupakan sektor andalan di Provinsi Riau yang perlu mendapat perhatian karena terjadinya perlambatan pertumbuhan. Subsektor yang secara signifikan melambat pertumbuhannya dan menurun outputnya dari tahun ke tahun adalah tanaman pangan. Adanya alih fungsi lahan dari subsektor tanaman pangan ke perkebunan menyebabkan ketersediaan pangan Provinsi Riau menurun. Penurunan tersebut akan berdampak pada tidak tercapainya kemandirian pangan di Provinsi Riau karena untuk mencukupi kebutuhan pangan daerahnya harus mendatangkan pangan dari daerah lain. Selain itu, adanya transformasi tenaga kerja dari sektor pertanian ke sektor lain juga merupakan hal penting yang perlu diperhatikan. Oleh sebab itu alokasi anggaran yang berlaku di Provinsi Riau harus efisien dan tepat sasaran agar dapat meningkatkan kinerja sektor pertanian. Mekanisme fiskal berupa peningkatan pengeluaran sektor pertanian dapat menjadi upaya yang tepat untuk meningkatkan kinerja sektor pertanian di Provinsi Riau.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Akai, N and M. Sakata. 2002. Fiskal Decentralization Contributes to Economic Growth: Evidence from State-Level Cross Section Data for the United States, *Journal of Urban Economics*. Vol.52, issue 1.
- Asnawi. 2005. Dampak Kebijakan Makroekonomi terhadap Kinerja Sektor Pertanian di Indonesia. Disertasi Doktor. Sekolah Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor, Bogor.
- Bank Indonesia. 2013. Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional Provinsi Riau Triwulan IV 2013, Pekanbaru.
- Budiyanto. 2014. Dampak Pengeluaran Pemerintah Daerah untuk Sektor Pertanian dan Industri terhadap Kinerja Perekonomian Provinsi di Indonesia, *KEK*. 18(3): 197 – 208
- Darsono. 2008. Analisis Keefektifan Kebijakan Fiskal terhadap Kinerja Sektor Pertanian dengan Penekanan pada Agroindustri di Indonesia. Disertasi Sekolah Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor, Bogor.
- Dirgantoro. 2010. Dampak Kebijakan Fiskal terhadap Perubahan Struktur Output dan Tenaga Kerja di Provinsi Jawa Barat. [Disertasi]. Sekolah Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor, Bogor.
- Lisna, 2014. Dampak kapasitas Fiskal terhadap Perekonomian dan Kemiskinan Sektoral Daerah di Indonesia: Suatu Analisis Simulasi Kebijakan. [Disertasi]. Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor, Bogor
- Kementerian Pertanian. 2013. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Kementerian Pertanian 2014. Jakarta.
- Kuotsoyiannis, A. 1978. *Theory of Econometrics*. Second Edition. *Harper & Row Publisher, Inc, USA*.
- Musgrave, R. A. 1989. *Public Finance in Theory and Practice*. McGraw-Hill, Singapore.
- Rindayati, W., M. P. Hutagaol dan H. Siregar 2007. Dampak Desentralisasi Fiskal terhadap Kinerja Fiskal Daerah dan Ketahanan Pangan di Wilayah Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Manajemen dan Agribisnis*, 4(2): 103-117.
- Saefudin. 2005. Dampak Desentralisasi Fiskal terhadap Kinerja Perekonomian dan Kelembagaan di Provinsi Riau. Tesis Magister. Sekolah Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor, Bogor.
- Salois M.J, Richard T. 2010. *The Health Effects of a Fiskal Policy*. Departement of Food Economics and Marketing, University of Reading. Freising, Germany.
- Situmorang, *et al.* 2009. Dampak Kebijakan Fiskal Daerah terhadap Ketahanan Pangan di Provinsi Sumatera Utara. *Forum Pascasarjana*, Vol. 33 No.2 April 2010.

- Sumedi, *et al.* 2013. Dampak Dana Dekonsentrasi Kementerian Pertanian dan Pengeluaran Daerah pada Sektor Pertanian terhadap Kinerja Pertanian Daerah. Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian, Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, Fakultas Ekonomi dan Manajemen, Institut Pertanian Bogor, Bogor.
- Wahyuni. 2009. Analisis Pertumbuhan dan Kontribusi Dana Bagi Hasil terhadap Pendapatan Daerah (Studi pada Kabupaten/Kota se Jawa-Bali). The 3<sup>rd</sup> National Conference UKWMS. October 2009, Surabaya.
- Wen-yan. 2010. The Impact of China's Fiskal Expenditure in Agriculture on Farmer's Income. *Asian Agricultural Research*, 2(5): 1-4.
- Yao-sen, L. 2009. Perubahan Fiskal Sektor Pertanian-Pengeluaran Pendukung dan Pendapatan Petani Berdasarkan Teori Grey Correlation. *Asian Agricultural Research*, 3(3): 92-95.